

PENYUSUNAN ANGGARAN DANA
PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH
DASAR NEGERI KARUAN OLEH
DIREKTORAT JENDERAL BINA
PEMERINTAHAN DESA



Nama : Karinia
Npm/Kelas : 44213775 / 3DA01
Jurusan : D3 Akuntansi Komputer
Pembimbing : Dr. Untara SE., MMSI.

Melihat kesenjangan sosial pada sekolah pedesaan dan sekolah perkotaan maka perlu dikaji ulang tentang pendistribusian anggaran dana pemerataan pendidikan khususnya Sekolah Dasar. Perbaikan maupun pembangunan struktur dan sarana penunjang penting untuk digalakan, guna membuat siswa lebih nyaman dan bersemangat dalam melaksanakan pendidikan, agar terciptanya SDA yang tangguh, kompeten, dan profesional.

1. Mengetahui Penyusunan Anggaran Pendidikan untuk desa – desa tertinggal.
2. Mengetahui Pelaksanaan Pendistribusian Anggaran Dana untuk SDN Karuan.
3. Mengetahui data dan surat penting terkait dengan Pendistribusian Anggaran Dana pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

1. Bagi Penulis khususnya memperoleh gambaran dunia kerja nyata untuk bekal persiapan setelah melewati masa perkuliahan serta dapat mengaplikasikan apa yang dipelajari di Kampus dengan di tempat kerja praktik.
2. Bagi Universitas dapat meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintahan dalam menyediakan tenaga kerja yang kompeten.
3. Bagi Pembaca sebagai sumber referensi alternatif apabila ingin mengkaji sebuah projek.

Penyusunan anggaran dana perbaikan gedung sekolah adalah proses perencanaan dana untuk membangun struktur dan sarana perlengkapan pendidikan dalam rangka mendukung terciptanya Pemerataan Pendidikan di Indonesia yang bertujuan agar seluruh bangsa negeri ini tidak mengalami ketertinggalan pendidikan. Anggaran Pendidikan mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena pendidikan merupakan pilar bangsa yang mampu memerangi kemiskinan. Diharapkan seluruh sekolah di Indonesia mendapatkan dana pembangunan gedung sekolah yang memadai supaya setiap anak bisa menyandang pendidikan yang layak.

1. Penyusunan

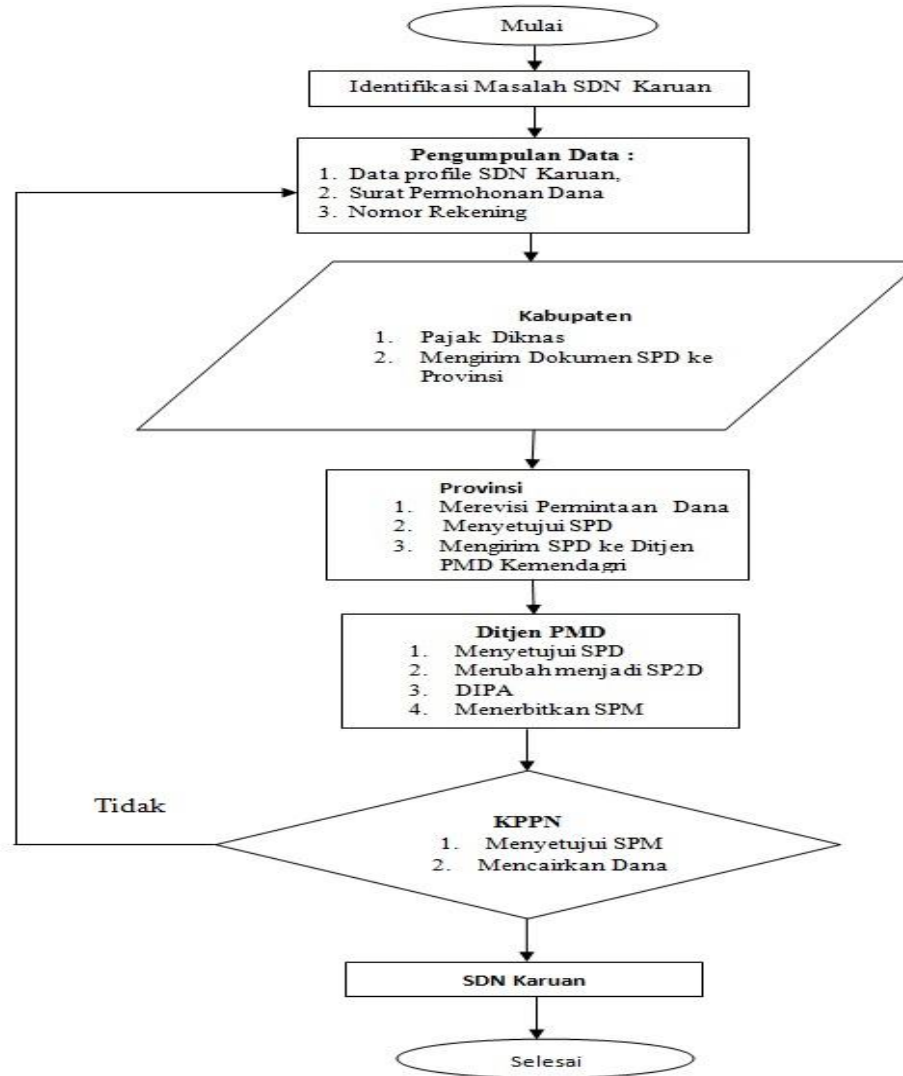
Adalah aktivitas perencanaan barang/jasa agar mudah didapatkan oleh konsumen sarasannya.

2. Tujuan Pendistribusian

Untuk mendukung program pemerataan pembangunan gedung sekolah di desa tertinggal agar mampu menciptakan Sumber Daya Manusia yang kompeten.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menangani seluruh permintaan dana perbaikan gedung Sekolah Dasar di Indonesia. Salah satu yang diambil oleh Penulis yaitu SDN Karuan, Wamesa, Papua Barat. SD ini membutuhkan dana untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.

Proses pelaksanaan Pendistribusian



Petunjuk Teknis Penyusunan:

A. Proposal masuk pada Bendahara Penerimaan

Proposal permohonan dana SDN Karuan masuk ke Kabupaten untuk diidentifikasi kebutuhannya.

B. Penyusunan DIPA untuk Lembaga Keuangan:

Langkah persiapan perintah pencairan anggaran untuk dialokasikan.

C. Persiapan Pendistribusian oleh Pemegang Anggaran:

Setelah DIPA diterima oleh lembaga keuangan, kemudian siap disalurkan lewat serangkaian proses yang dilakukan Ditjen PMD disertai dengan pengendalian internal.

Pelaksanaan Pendistribusian Anggaran Dana:

- A. Komite Sekolah menyiapkan RAPBS.
- B. PPK Dewan Pemerintahan Daerah II merubah RAPBS menjadi SPD dan melakukan potongan pajak.
- C. KPA Ditjen PMD merubah SPD menjadi SP2D dan merancang DIPA, jika telah memenuhi semua persyaratan maka diterbitkanlah SPM.
- D. KKPN memeriksa kelengkapan SP2D jika telah memenuhi syarat maka dikabulkanlah SPM.
- E. Bank Operasional memindah bukukan saldo rekening pada rekening SDN Karuan.

Data Terlampir Pendistribusian Anggaran Dana:

1. SPD direvisi oleh Diknas Dewan Pemerintahan Tingkat II.
2. DIPA sebagai dasar pelaksanaan Menteri Keuangan.
3. SPD dan SPM untuk pelaksanaan pengeluaran.

1. Evaluasi Pendistribusian

Pendistribusian terbilang lama karena saat SPD masuk pada tiap divisi memerlukan tenggang hari yang cukup lama untuk memperoleh konfirmasi, hal ini dapat memperlambat proses pembukuan.

2. Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian.

Perlu dikaji ulang guna menghindari kesalahan dalam pengumpulan data dan pemotongan dana, hal ini harus selalu disertai pengendalian intern.

3. Evaluasi Dokumen Terlampir.

Dirasa terlalu banyak dokumen yang harus dilampirkan. Seharusnya Ditjen PMD membuat Software khusus untuk permintaan dana daerah agar memudahkan Pemerintah Pusat saat akan mengambil data Pendidikan Daerah.

Manfaat Kerja Praktik

Kerja praktik ini membuka dan menambah wawasan tentang pengetahuan Akutansi Pemerintah. Juga melatih kedisiplinan, kerja keras, dan profesionalisme. Karena tugas dan pekerjaan yang diberikan harus selesai pada waktunya. Disamping itu, kerja praktik ini menambah bekal kesiapan menghadapi dunia kerja.

1. Keberadaan Ditjen PMD membantu Pemerintah dalam melanjutkan pendistribusian anggaran dana untuk pemerataan pendidikan.
2. Pelaksanaan pendistribusian anggaran dana untuk perbaikan gedung SDN Karuan telah sesuai dengan petunjuk teknis dari aturan yang ditetapkan.
3. Data terlampir untuk proses pendistribusian dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat.

Berdasarkan data dan pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan kerja praktik pada Ditjen PMD, penulis menemukan hal yang harus diperhatikan seperti halnya Pemerintah seharusnya menyediakan cadangan mandiri anggaran pendidikan yang ditempatkan di Diknas terdekat, selain itu pemerataan pendidikan dan kelayakan infrastruktur sekolah desa tertinggal harus semakin digalakan.

TERIMAKASIH 😊